

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN BERBASIS WEB

Husnul Hotimah¹, Andi Wijaya², Zainal Arifin³

^{1,3}Jurusan Teknik Informatika, STT Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

²Jurusan Teknik Elektro, STT Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

¹msyshyleef4@gmail.com, ²mr.andiwijaya@gmail.com, ³Dje.dje.415@gmail.com

Abstract

Case is an action that often occurs in the community wheater it is a criminal cases (drugs, harrasment, murderer, etc) and civil cases of abuse (divorce, in herintance, etc). Case management starting from the reporting, complaint, or the registration of the legal services to the execution phase and correctional decision is an integral process of the start of the legal events in the community until the establishment of a state or recoverable back justice in society. So that the district court on duty and autorized to investigate, adjudicate and resolve criminal cases and civil cases and the first level. Methods used in the making of this information system is the observation by coming directly to the district court kraksaan, conduct interviews on the parties and collected data arrives related to case management. The purpose of the development of case management information system is to provide easy to get the information in a case. The advantages of this system is the ease of finding a case of data. The weakness of the system not complete all the data stored in the base case data and performance has not been tested with good system.

Keyword: System, Data, Court, Case

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat, perlu ada proses penegakan hukum dan lembaga yang bertugas untuk mengadili segala perkara pelanggaran hukum dalam masyarakat. Adapun lembaga pengadilan yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 4 yaitu:

1. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.
2. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Negeri Kraksaan merupakan salah satu lembaga pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama yaitu tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Probolinggo. Permasalahan dari informasi yang dihasilkan di Pengadilan Negeri Kraksaan yaitu pengolahan datanya masih ada yang menggunakan fasilitas dari Microsoft Excel diantaranya data bulanan perkara pidana dan

perdata. Sehingga untuk penambahan datanya masih *copy-paste* atau mengetik ulang dan membutuhkan banyak *file* untuk menyimpan serta dapat mengakibatkan lamanya pemrosesan dalam perekapan data perkara. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, akan dibangun sebuah sistem yang menangani perkara yaitu perkara pidana dan perkara perdata yang mana dalam pengolahan datanya sangat efektif karena dalam sistem ini hanya membutuhkan beberapa tabel dan langsung tersimpan dalam *database*. Selain itu, di dalam sistem ini juga dapat meng-*import* atau menambahkan data dari sistem lama.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dikemukakan pada pembahasan latar belakang diatas, maka secara garis besar rumusan masalah yang akan diselesaikan adalah “**Bagaimana aplikasi sistem informasi manajemen perkara di pengadilan negeri kraksaan berbasis web ini dapat membantu pihak terkait dalam memberikan pelayanan**”.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat adanya masalah maupun hal-hal yang perlu dibahas pada bagian sistem penelusuran perkara dan supaya permasalahan lebih terarah, maka dalam membangun sistem informasi rekapitulasi data perkara di pengadilan negeri kraksaan hanya terbatas pada :

1. Pengolahan data yang terdiri dari data perkara pidana.
2. Pengolahan data yang terdiri dari data perkara perdata.
3. Laporan berupa:
 - a. Data perkara pidana.
 - b. Data perkara perdata.

1.4 Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas Tujuan dari pembangunan sistem ini adalah untuk menghasilkan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perkardi Pengadilan Negeri Kraksaan berbasis WEB sehingga dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi selanjutnya dalam suatu perkara.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan studi literatur.

1. Observasi

Observasi dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Kraksaan yang mana mengamati proses penyampaian informasi mengenai manajemen perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kraksaan yang bertempat di Jl. Raya Panglima Sudirman No.5 Kraksaan. Data observasi diperoleh langsung dari petugas PanMud Hukum.

2. Wawancara

Pengambilan data objek yang diteliti melalui atau wawancara *interview* secara langsung kepada petugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan tentang sistem manajemen perkara dan mengetahui data yang dibutuhkan. Kemudian untuk detail perkara langsung di arahkan ke bagian Panitera Muda Pidana yang khusus menangani perkara pidana serta ke bagian Panitera Muda Perdata yang khusus menangani perkara perdata.

3. Studi Literatur

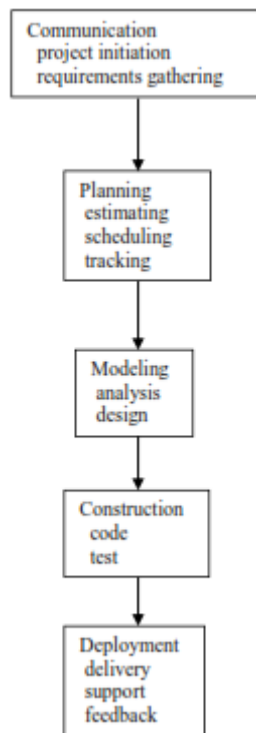
Merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengambil data dari buku, jurnal yang berkaitan dalam penulisan laporan skripsi ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai landasan teoriti sekaligus data dalam penelitian dilapangan serta sebagai alat analisa terhadap permasalahan ini.

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem

1. Tahapan Metodologi Waterfall

Menurut Pressman (2010) dalam “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web Studi Kasus Rumah Sakit Lanud Sam Ratulangi” oleh Mohamad Topan, dkk

menyatakan bahwa metodologi *Waterfall* adalah merupakan salah satu contoh dari proses perencanaan, dimana semua proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan. Proses dari metode *waterfall* antara lain *Communication, Planning, Modeling, Construction, Dan Deployment.*



(Sumber: Mohamad Topan. 2015)

Gambar 1 Model proses *Waterfall*

a. *Communication* (Komunikasi)

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan *software* dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan pihak utama yang terkait yaitu bagian PanMud Hukum, maupun pihak pendukung yaitu bagian PanMud Pidana dan PanMud Perdata, serta mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di buku, jurnal maupun dari website.

b. *Planning* (Perencanaan)

Proses *planning* merupakan lanjutan dari proses *communication* (*analysis requirement*). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen *user requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan *user* dalam pembuatan *software*, termasuk rencana yang akan dilakukan.

c. *Modeling* (Pemodelan)

Proses *modeling* ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan *software* yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*/sebelum melakukan proses pengkodean.

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur *software*, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut *software requirement*.

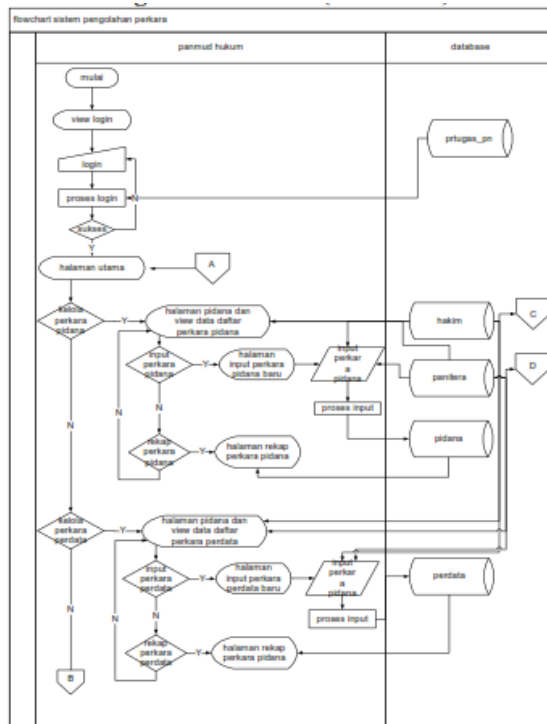
d. *Construction* (Konstruksi)

Construction merupakan proses membuat kode (*coding*). *Coding* atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer akan menterjemahkan transaksi yang diminta oleh *user*. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu *software*, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahankesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.

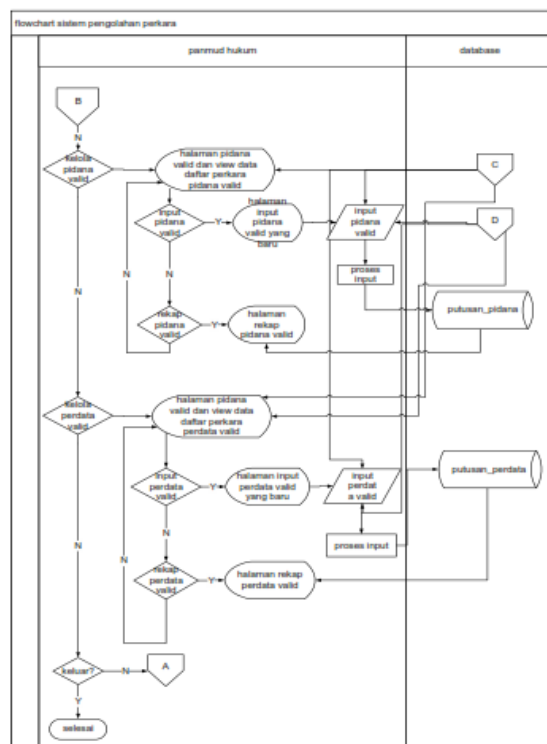
e. *Deployment* (Penyerahan)

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah *software* atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh *user*. Kemudian *software* yang telah dibuat harus evaluasi jika ada kekurangan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.

2.2.1 Bagan Alur Sistem (*Flowchart*)



Gambar 2 Flowchart SIM Perkara



Gambar 3 Flowchart SIM Perkara

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Analisa Sistem

Setelah melakukan penelitian dan observasi dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu staf panmud pidana, panmud perdata dan panmud hukum Pengadilan Negeri Kraksaan maka dapat diketahui bahwa identifikasi masalah yang ada pada pelayanan perkara pada sistem lama masih menggunakan manual mengenai penyampaian informasi terhadap majelis / hakim adalah sebagai berikut:

1. Informasi jadwal pelaksanaan sidang atau persidangan, yang selama ini penyampaian informasinya masih menunggu berkas yang akan dipersidangkan.
2. Pendataan data perkara yang telah diputus maupun belum diputus dimana masih menggunakan manual yakni ditulis dalam buku besar. Sehingga, jika suatu saat perkara tersebut akan dilakukan banding atau tindak lanjut persidangan kembali maka membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data perkara tersebut.

2.2 Perancangan Sistem

Setelah melakukan analisa sistem kemudian dilakukan melakukan perancangan sistem. Ada tiga perangkat dalam perancangan sistem yaitu *Flowchart*, *Data Flow Diagram (DFD)*, dan *Entitas Relationship Diagram (ERD)*.

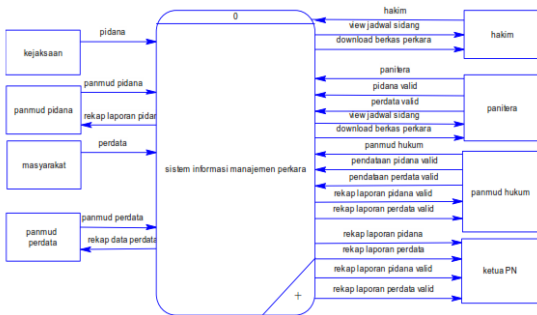
2.2.2 Arus Data

Arus data merupakan aliran yang menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem

dan dapat digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditetapkan.

1. Diagram Konteks

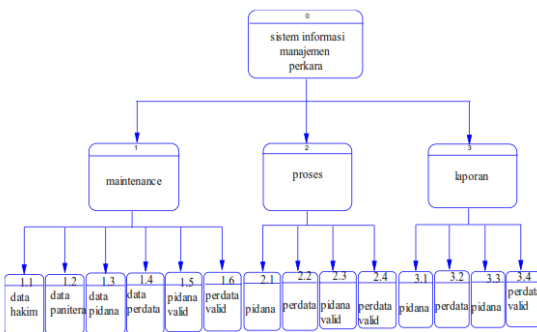
Context Diagram dalam level ini menggambarkan bagaimana hubungan antara entity, proses dan data secara global, dalam level ini, proses yang ada hanya di gambarkan dalam sebuah sistem dengan mengasumsikan sistem tersebut sebagai sebuah proses yang terdiri dari sekumpulan proses. Pada desain dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Perkara secara Online seperti di bawah ini:



Gambar 4 Context Diagram Sistem Informasi Manajemen Perkara

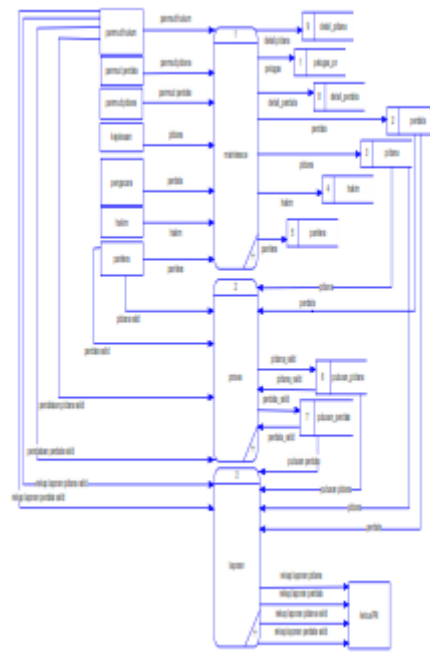
2. Bagan Berjenjang

Diagram berjenjang (Hierarchy Chart) adalah penggambaran sistem dalam bentuk hirarkial. Dalam diagram berjenjang hanya proses dan garis hirarkial saja yang digambarkan tanpa menyertakan Data Storage dan arus datanya. Bagan berjenjang dapat digambarkan dengan menggunakan notasi proses yang digunakan di Data Flow Diagram (DFD). Adapun desainnya sebagai berikut:



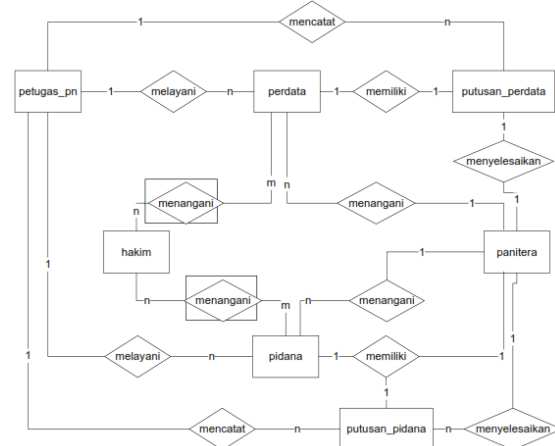
Gambar 5 Bagan Berjenjang

3. Data Flow Diagram (DFD)



Gambar 6 DFD SIM Perkara

4. ER-Diagram



Gambar 7 ERD SIM Perkara

Kamus data:

- petugas_pn** :kode_petugas*, username, password, level, alamat, tlp
- hakim** : no_hakim*,kode_hakim*,nama_hakim, tetala_hakim, jk_hakim, agm_hakim, jbtn_hakim
- panitera**:no_pan*,kode_pan*,nama_pan,tetala_pan, jk_pan, agm_pan, jbtn_pan
- pidana**:urut_pid*, no_perpid**, majelis_pid**, nm_trdakwa,no_pelimpahan,tgl_perujukan, tgl_sidangpid, berkas_pid, ket.
- perdata**:urut_pdt*,no_perpdt**,majelis_pdt**, nm_tergugat,almt_tergugat, m_penggugat, almt_penggugat, tgl_sidangpdt, berkas_pdt.
- menangani/putusan_pid** : no_pid*, no_perpid**, majelis_pid**,pid_tahun, pid_bulan, tgl_terimapid,

tgl_majelispid, tgl_sidangpid, tgl_ptsnpid,
pid_blmdibagi, status_ptsnpid,
pid_blmminutir

menangani/putusan_pdt: no_pdt*, no_perpdt**,
kode_hakim**, kode_pan**, pdt_tahun,
pdt_bulan, tgl_terimapdt, tgl_majelispidt,
tgl_sidangpidt, tgl_ptsnpdt, pdt_blmdibagi,
status_ptsnpdt, pdt_blmminutir.

detail_pidana:no_majelispid*, kode_majelispid**,
pid_hakim1, pid_hakim2, pid_hakim3,
pid_pan

detail_pdt:no_majelispidt*, kode_majelispidt**,
pdt_hakim1, pdt_hakim2, pdt_hakim3,
pdt_pan

2.3 Tampilan Antar Muka (Interface)

2.3.1 Tampilan Login



Gambar 8, Tampilan Login

2.3.2 Menu Utama



Gambar 8, Menu Utama

2.3.3 Laporan Pidana

Laporan Perkara pidana

No	No perkara	Majelis	Terdakwa	No pelimpahan	Tanggal	
					Penunjukan majelis	Sidang
1	265/B/15	C6C3C8D2	Suryon alias yon Bin Sumarsi Probolinggo, 22 tahun / 5 November 1993 laki- laki Indonesia Dusun Pandansari, Desa Pandansari RT. 05 RW. 005 Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo Islam Tani SD	B265/Ep.1/08/15	3 September 2015	3 September 2015
2	266/B/15	C6C3C8D13	Nur Hasan alias P. Nur Bin Johari Probolinggo 39 tahun laki-laki Indonesia Dusun Krajan RT.01 RW 03 Desa Wonorejo Kecamatan Maron	B266/Ep.1/08/15	3 September 2015	3 September 2015

Gambar 9, Laporan Pidana

2.3.4 Laporan Perdata

Laporan Perkara Perdata

No	No perkara	Majelis	Tergugat	Alamat Tergugat	Penggugat	Alamat Penggugat	Tanggal Sidang
1	36/Pdt.G/2015/P N.Krs	C6C3C8D14	Timi	Dusun Wonosari RT. 03 RW. 07 Desa Wonokerso Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo	Moh Arifin	Dusun Krajan RT. 05 RW. 03Desa Sapi Kerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	02 September 2015
2	37/Pdt.G/2015/P N.Krs	C1C7C4D10	Mika Darmayanti	Dusun kota RT. 14A RW 8 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo	Arnold Duls Floren Putra, SH	Dusun kota RT. 14A RW 8 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo	09 September 2015

2.3.5 Analisa Pengujian Program

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem

No	Subjek	Pertanyaan	Hasil	
			Y	T
1	PanMud Pidana	Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan serta membantu pihak pidana dalam menangani perkara pidana	✓	
2	Panmud Perdata	Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan serta membantu pihak perdata dalam menangani perkara perdata		
3	PanMud Pidana / PanmudP erdata	Apakah dengan adanya sistem informasi ini proses penyampaian informasi kepada majelis / hakim akan lebih mudah?	✓	
4	Majelis / Hakim	Apakah informasi yang disampaikan oleh sistem informasi ini dapat dengan mudah untuk dipahami?	✓	

3. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sistem informasi manajemen perkara sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen perkara ini dapat membantu pihak Pengadilan Negeri Kraksaan dalam mengelola serta pendataan data perkara pidana sebelum maupun sesudah dilakukannya suatu persidangan.
2. Sistem informasi manajemen perkara ini dapat membantu pihak Pengadilan Negeri Kraksaan dalam mengelola serta pendataan data perkara perdata sebelum maupun sesudah dilakukannya suatu persidangan.
3. Sistem informasi manajemen perkara ini dapat membantu pihak terkait dalam proses penyampaian informasi suatu perkara.
4. Sistem informasi ini dapat membantu majelis/hakim sebelum melakukan persidangan terhadap suatu perkara.

4. Daftar Pustaka

- Aryanti, N. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data-Hukum dan PerundangUndangan Pada Departemen Hukum dan HAM. *Universitas Gunadarma*, 1-16.
- Gaol, C. L. (2008). *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*.
- Hasyimsah, D. d. (2015). *Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan: Sistem dan Bentuk Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Masriani, Y. T. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vanny, R. (2012). Pengolahan data Arsip Dinamis Inaktif Hukum Menggunakan Microsoft Access Di Kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang*, 1-11.
- Yutelmi, S. (2011). Sistem Informasi Pengolahan Data Perkara. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1129.